



**SAMBUTAN
PADA
ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2010**

Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Gubernur Kalimantan Barat

Yth. Para Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Para Bupati/Walikota Se Provinsi Kalimantan Barat

Yth. Muspida Kalimantan Barat atau yang mewakili

Yth. Rektor Universitas Tanjungpura

Yth. Kepala BPKP Kalimantan Barat

Hadirin para undangan yang kami hormati

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini pada acara serah terima jabatan kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. *Alhamdulillah* acara serah terima jabatan tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

Acara sertijab ini dilaksanakan, menyusul pelantikan saudara Ir. Adi Sudiby, MM menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada Jum'at 3 Desember 2010, atau sepuluh hari yang lalu. Pengisian jabatan kepala perwakilan ini memang agak sedikit terlambat. Meskipun demikian, hal ini – *alhamdulillah* – tidak mengganggu kinerja perwakilan dalam menjalankan amanat UUD 1945. Sebelumnya, seiring berakhirnya bulan Oktober 2010 yang lalu, saudara Drs. Mudjijono, kepala perwakilan yang lalu, telah memasuki masa purna tugas. Kepada saudara Mudjijono, kami atas nama BPK RI dan juga atas nama pribadi, mengucapkan penghargaan setinggi – tingginya dan terimakasih atas segala pengabdian saudara selama ini. Pengabdian saudara dalam mengawal berdirinya kantor perwakilan BPK RI di Kalimantan Barat ini sangatlah berarti bagi pengembangan BPK. Makna lebih jauh dari hal ini adalah, saudara Mudjijono telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik terutama di Kalimantan Barat. Semoga Allah swt meridloi dan menerima seluruh amal baik saudara bagi BPK ini. Amin.

Bapak dan Ibu, Hadirin yang kami hormati

Kepala perwakilan yang baru, yaitu saudara Adi Sudiby, sebelumnya menempati posisi sebagai Kepala Sub Auditorat yang membawahi Departemen Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, kami menilai sangatlah tepat ketika saudara Adi Sudiby memperoleh amanah sebagai kepala perwakilan BPK RI di Kalimantan Barat ini. Kenapa? Karena saat ini pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat adalah merupakan suatu hal yang kami pandang penting untuk dilaksanakan. Hal ini demi memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam transportasi yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan roda perekonomian rakyat secara merata.

Penempatan saudara Adi Sudiby ini, pada akhirnya nanti kami harapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal gerak langkah pembangunan fasilitas infrastruktur di Kalimantan Barat. Dengan melalui mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, maka BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat diharapkan mampu meminimalkan berbagai hal yang

menjadi potensi penyalahgunaan keuangan daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keahlian saudara Adi Sudibyو selama ini dalam pemeriksaan bidang infrastruktur, ataupun dalam bidang yang terkait dengan masalah ke-PU-an. Namun demikian, kami meyakini bahwa, meskipun bidang ke-PU-an ini sangat saudara kuasai, tetapi kemampuan akan pemeriksaan keuangan tidak akan mengalami kemunduran dari periode sebelumnya. Bahkan akan semakin sempurna kebaikannya.

Hadirin yang kami hormati

Pergantian pejabat tersebut merupakan hal yang rutin dilakukan oleh Pimpinan BPK dalam rangka penyegaran organisasi. Pelantikan para pejabat tersebut telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2010 di Jakarta, dan serah terimanya baru kita laksanakan pada hari ini.

Kepada saudara Adi Sudibyو, kami harapkan agar segera aktif di Kalimantan Barat. Mulai hari ini. Dan kepada saudara Mudjijono, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara atas kepemimpinan saudara selama lima tahun terakhir ini.

Masa kepemimpinan saudara Mudjijono selama kurun waktu lima tahun ini, kami pandang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Barat ini. Beberapa temuan signifikan telah diungkapkan selama kurun waktu tersebut. Beberapa hal yang menonjol adalah masalah pengelolaan aset pemerintah daerah yang masih harus disempurnakan lagi. Hal ini terutama untuk daerah – daerah pemekaran baru yang lepas dari kabupaten induk. Selain itu, terkait dengan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah dalam laporan keuangan daerah, alangkah baiknya apabila pemerintah daerah selalu cermat dan hati – hati dalam menyajikan nilai Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar capaian opini atas laporan keuangan bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya, kami melihat bahwa pada beberapa entitas pemerintah daerah terdapat kecenderungan para pelaksana pengelola keuangan daerah untuk “bermain – main” dalam pelaksanaan belanja daerah. Beberapa kasus sudah kami ungkap dan kami sampaikan kepada aparat

hukum untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, kami meminta kepada para hadirin semua untuk selalu mengingatkan para pelaksana pengelolaan keuangan daerah agar mereka bertindak dengan hati dan fikiran yang dibimbing nilai – nilai Ilahiah. Bukan memperturutkan keinginan duniawiah semata yang pada gilirannya membawa petaka bagi semuanya.

Kami akan selalu memantau perkembangan perbaikan atas pengelolaan keuangan daerah ini. Mekanisme pemantauan tindaklanjut telah kami jalankan. Dari pemantauan BPK RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pada semester I (satu) tahun 2010, BPK RI melaporkan temuan pemeriksaan sebanyak 2.089 temuan dengan nilai sebesar Rp31,98 trilyun. Dari total temuan tersebut, jumlah rekomendasi adalah sebanyak 4.136 dengan nilai rekomendasi sebesar Rp3,21 trilyun. Rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti sesuai saran BPK RI sebanyak 1.545 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp436,99 milyar. Kemudian tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.090 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1,44 trilyun. Sedangkan rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.051 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1,33 trilyun. Untuk itu kami minta kepada seluruh Ketua DPRD yang hadir di forum ini agar segera melaksanakan pemantauan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010. Kepada saudara Gubernur dan seluruh Bupati dan Walikota yang hadir saat ini, kami minta untuk segera melakukan langkah – langkah strategis guna melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini. Hal ini semata – mata agar capaian tata kelola keuangan daerah yang baik dapat kita tingkatkan dan kita jaga selalu aplikasinya dalam kehidupan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawab kita bersama.

Hadirin yang kami hormati,

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004, perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 E Undang Undang Dasar RI Tahun 1945. Sesuai dengan konstitusi tersebut, BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan lingkup pemeriksaan semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Sementara, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan oleh BPK sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini, bobot terbesar dalam melaksanakan pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 31 UU No.17 Tahun 2003. Regulasi tersebut mengatur bahwa sebelum Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh BPK dengan memberikan opini.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) juga telah dilakukan oleh BPK, antara lain pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan tertentu seperti pemeriksaan atas infrastruktur, pemeriksaan belanja daerah, pemeriksaan pendapatan, pemeriksaan atas pengelolaan aset, dan lain-lain.

Khusus untuk pemeriksaan kinerja, jumlahnya masih terbatas dan secara bertahap BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja sehingga ke depan BPK dapat memberikan suatu rekomendasi dalam perbaikan tata kelola keuangan yang terkait dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan UUD 1945, UU No.15 Tahun 2004 dan UU No.15 Tahun 2006, diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan negara disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, serta Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Sesuai bunyi pasal 17 ayat (7) UU No.15 Tahun 2004 dan pasal 7 ayat (4) UU No.15 Tahun 2006, tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat jika ditindaklanjuti oleh para pemilik kepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat guna perbaikan ke depan.

Dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan optimalisasi pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2006 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK yang diwakili Kepala Perwakilan dengan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada saat itu, jumlah Perwakilan BPK hanya tujuh Perwakilan. Kemudian, pada akhir tahun 2008, BPK memiliki 33 Perwakilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam kaitan itulah, BPK kemudian melakukan kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi kita untuk bekerja lebih optimal lagi dalam mengawal terwujudnya tata kelola yang baik di masa yang akan datang.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini akan lebih memudahkan dalam melaksanakan ketiga fungsi yang dimiliki, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Dalam kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kepada pimpinan dan anggota DPRD, kami menghimbau untuk meningkatkan pemahaman terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK karena apapun hasil pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPK, akan lebih bermanfaat ketika **mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pemakai laporan**. Untuk itu, BPK membuka diri bagi pertemuan konsultasi dalam rangka memperjelas substansi yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan.

Hadirin yang kami muliakan,

Akhirnya, dengan telah dilakukannya serah terima jabatan kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dari pejabat lama ke pejabat yang baru, maka kami berharap akan membawa kita semua kepada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, kami juga berharap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, sesuai harapan masyarakat.

Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara, semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa. Amin.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb

**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Anggota VI**

DR. H. Rizal Djalil